



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONNY ROEKMITO
2. Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 108810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.074.896.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m²/120 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 174.896.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 294 m²/280 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1138 m²/500 m² di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 755.500.000

1. LAINNYA, --- (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI SUV Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 407.595.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 308.164.637

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.546.155.637



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.546.155.637

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.